

BEBERAPA ASPEK DARI PADA PLANNING.--

(Tjeramah pada Sekolah Staff Dep.Tenaga Kerdja,18-1-1972).

oleh :

S e e d j a t m o k o .--

P e n d a h u l u a n .--

Sebenarnja masalah sosial planning ini merupakan suatu bidang jang didalam satu dua tahun jang terachir ini mengalami banjak perubahan, karena orang mulai menjadari betapa kurangnya konsepsi daripada social planning itu didalam tahun jang sudah2. Kalau didalam usaha pembangunan didalam dasawarsa pembangunan PBB, "First Development Decade", itu ditekankan pada tertjapainja "rate of growth", ladju pertumbuhan ekonomi sebesar 6 atau 7 0/0, dan social planning itu terutama diadkan untuk memungkinkan tertjapainja tujuan itu, maka sekarang sudah timbul kesadaran jang sangat tajam tentang betapa tidak tjukupnja konsepsi social planning sematjam itu.

Konsepsi2 social planning jang traditionil ialah kita menentukan berapa kira2 ladjunja pertumbuhan ekonomi jang harus ditjapai, dan kita lihat pada segi2 employment, dan manpower development pada umumnja, segi pendidikan skill, dan ilmu pengetahuan dan kita djuga melihat kepada segi kesehatan, segi perumahan dan social security. Semuanja dengan maksud untuk melajani keperluan daripada sasaran2 "growth rate" jang ditentukan itu.

Djadi dalam dasawarsa pembangunan PBB jang sudah ini, konsepsi pembangunan itu dianggap hampir identik dengan growth rate, dan semuanja usaha dibidang sosial diarahkan kesana.

Dan kalau kita melihat kepada susunan pemerintah kita, susunan itu memang mentjerminkan konsepsi ini. Ada sektor EKUIN dan ada sektor sosial, se-olah2 masalah sosial itu merupakan segi tersendiri didalam keaktifan daripada Pemerintah lepas dari keaktifannja lain. Se-olah2 faktor2 sosial hanya merupakan faktor2 jang harus diperhatikan setelah tujuan2 ekonomi ditentukan, sebagai usaha pembantu dan pelengkapnja.

Oleh karena itu, misalnja perkembangan kesehatan, ilmu pengetahuan, pembinaan tenaga kerdja, pembinaan suatu public opinion jang informed, jang science dan development oriented, semuanja itu dilihat perlunja terutama sebagai kondisi2 sosial untuk memungkinkan tertjapainja tujuan2 "growth rate" tadi.

(2) Tetapi.....

Tetapi sekarang sudah mendjadi lebih terang bahwa djikalau kita hanya menjatakan sasaran2 itu dalam bentuk tertjapainja "growth rate" tertentu, maka akan timbul matjam2 "distortions", ketidakimbangan, penjelewengan dan perubahan2 jang tidak disangka dan jang tidak dikehendaki didalam proses pembangunan. Misalnja, djikalau kita sungguh2 mau mengedjar growth rate jang se-tinggi2 nja, maka sebenarnja jang harus kita pegang teguh sebagai faktor jang menentukan jaitu faktor efficiency.

Kalau kita lihat pada faktor efficiency ekonomi sadja, maka didalam situasi Indonesia sekarang ini, mau tak mau prang harus mengambil kesimpulan bahwa kalau mengadakan investasi jang typenja tidak tergantung daripada tempat2 dimana bahan2 mentah diketemukan (djadi diluar "mining"), sebaiknja semuanya ditempatkan di Djakarta. Sebab, disana tenaga kerdjanja ada, fasilitas2 listrik ada, fasilitas untuk management, sekolah untuk anak2 nja, fasilitas2 entertainment, semuanya ada. Hubungan komunikasi baik, sehingga urusan supply maupun pemasaran paling gampang. Djadi, sebagian dari industri2 jang bukan mining atau jang tidak berdasarkan mining, logienja ditempatkan di Djakarta, atau se-tidak2 nja disalah satu kota besar di Djawa. Tapi kalau itu terdjadi, kita tidak bisa mendjamin tetap bersatunja Indonesia. Kita djuga tidak bisa mentjegah ketidak seimbangan antara pusat dan daerah, ketidak seimbangan anatara pusat Djakarta dengan daerah pedesaan. Kita tidak bisa mendjagaimbangan anatara Djakarta dengan kota2 lainnja di Indonesia, baik di Djawa maupun diluar Djawa. Maka disini kita melihat bahwa, kalau kita setjara konsekwen hanya mengedjar "growth rate" jang mentjukupi, kita harus berpegang kepada efficiency dan pasti akan timbul distortion matjam2 didalam struktur sosial dan struktur politik jang pada suatu ketika akan menimbulkan ledakan2, explosie2 jang bisa mengantjam stabilitas dan kesatuan negara.

Pentingnja faktor2 sosial.

Maka perlu diadakan policy dibidang industri jang mengadakan koreksi atau kompensasi pada criterium efficiency. Diperlukan suatu politik industri jang tidak hanya melihat kepada matjamnja industri2 jang kita perlukan, tetapi djuga kepada "location" dari pada industri itu, dimana industri itu mesti ditempatkan. Begitu djuga, djaka kita hanya mengedjar growth rate dengan sendirinja akan timbul pula situasi2 jang tidak adil, jang menjalahi

(3) "keadilan sosial"....

"keadilan sosial", sebabnja ialah bahwa oleh karena kemampuan mereka dibidang ekonomi jang sudah ada, golongan kaya akan mendjadi lebih kaya dan golongan miskin akan mendjadi lebih miskin.

Maka disinilah kita sudah dapat melihat bahwa kalau kita hanya mendedjar "growth rate" itu tanpa ada kompensasi didalam kebidjaksanaan sosial, maka akan timbul hal2 jang tidak kita ingini, hal2 jang bisa mematjatkan pembangunan.

Namun, masalah keadilan sosial, bukan se-mata2 suatu soal moral; dia djuga mempunjai arti ekonomis. Djika penghasilan orang banyak mendjadi terlalu rendah, maka timbul bahaya bahwa apa jang dihasilkan dengan alat2 produksi modern itu tidak mempunjai pasaran, karena pasaran tidak mempunjai daya beli. Disinilah pentingnja politik distribusi penghasilan dan suatu politik menambah penghasilan rakyat banyak untuk membuka berdjuta2 rakyat Indonesia sebagai pasaran usaha kita sendiri.

Maka kita lihat disini betapa pentingnja pembangunan itu tidak terlalu sempit, baik dalam konsepsi maupun dalam pelaksanaan. Suatu landasan sosial jang sempit dalam usaha pembangunan kita akan menimbulkan matjam2 akibat dan akan matjet sendiri.

Demikianlah pengembangan daripada industri, pengembangan daripada sektor modern di Indonesia ini, tidak bisa kita adakan tanpa kita memperkembangkan daerah pedesaan dan tanpa kita memperkembangkan suatu domestic, suatu "internal market".

Djelaslah disini kita lihat, bahwa bukan sadja demi keadilan sosial dan demi ketenteraman politik kita menanamkan didalam usaha pembangunan kita itu unsur keadilan sosial, tetapi djuga karena keperluan2 ekonomi itu sendiri.

Persoalan ini djuga mengingatkan kita bahwa dalam usaha pembangunan, kita sebenarnja berhadapan dengan pertanyaan, tentang masyarakat matjam apa jang kita kehendaki.

Tudjuan Pembangunan.-

Kalau kita mengadakan pembangunan kita tidak dapat bitjara hanya mengenai "growth rate" itu.

Kita harus bitjara mengenai masjarakat jang kita tudju.

Masyarakat matjam apakah jang kita sebut masyarakat adil dan makmur? Dan bagaimana tudjuan adil dan makmur itu ditrapkan kepada keperluan2 pertumbuhan ekonomi. Pastilah kalau growth rate 6

(4) sampai.....

sampai 7 0/0 tidak ^{sampai} tertjapai, maka segala persoalan lain djuga tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita atasi.

Maka demikianlah pengadjaran "growth rate" perlu, namun tidak tjukup. Tudjuan2 lain harus kita masukkan. Maka didalam Planning Repelita II, mau tak mau keadilan sosial harus turut mendjadi focus daripada usaha planning.

Keperluan itu timbul baik dari segi politis, supaja rasa keadilan tersinggung, maupun dari segi keperluan untuk mendjaga tetap berlangsungnja momentum pembangunan jang sudah ditjapai sekarang ini.

Djadi teranglah perentjanaan untuk pembangunan itu menghadapkan kita dengan masalah2 pokok daripada masjarakat kita. Masjarakat matjam apa jang kita kehendaki? Apakah masjarakat jang berlimpah2 dalam kekajaan materiilnja? Masjarakat seperti Djakarta sekarang? Apakah dihari depan Indonesia itu harus ada 20- Djakarta? Dengan steambath dan djudinja. Apakah Medan ^{misalnya} harus seperti Djakarta, dsb.nja.

Apakah tudjuan itu baik? Dan apakah tudjuan itu mungkin?

Pertanjaan2 sematjam inilah harus kita djawab.

Saja sendiri yakin, pertama bahwa tudjuan itu tidak mungkin tertjapai. Karena pola dan tingkat konsumsi jang sekarang mulai mendjelma di Djakarta itu sebenarnja terlalu tinggi untuk Indonesia seluruhnja. Djika toh dilaksanakan, akan merupakan beban jang terlalu besar pada neratja pembajaran kita; kita akan terlalu tergantung dari import danbarang2 konsumsi dari luar.

Kedua, saja rasa memang tidak tepat bagi kita untuk membajangkan hari depan Indonesia sebagai Djakarta se-olah2 meliputi semua rakjat Indonesia. Djadi kalau kita tidak menghendaki hari depan sematjam itu, maka bagaimana kita merentjanakan suatu hari depan jang lain?

Segi2 pokok social planning.

Suatu garis, suatu djurusan pertumbuhan dan perkembangan masjarakat Indonesia jang tidak mendjurus kepada sasaran dan tudjuannya, inilah jang mendjadi objek daripada social planning kita sekarang ini.

Ada jang mengatakan bahwa dalam 25-th kita sudah kedjar tingkat kehidupan seperti Djepang, saja rasa ini tidak benar.

Saja rasa bahwa hal ini benar untuk beberapa kelompok daripada

(5) seluruh.....

seluruh rakjat Indonesia. Dan kalau kita kedjar djalan itu, kita akan muntjul dimana negara2 Amerika Latin sekarang berada. Disana per capita income sekarang sudah mendjadi \$ 350, tetapi matjet disana. Matjet, karena jang mentjiptakan dan menikmati GNP mereka, penghasilan mereka itu, yakni golongan menengah, golongan pengusaha, se-olah2 sudah kendor dorongannja. Uangnja lebih senang di-simpan di bank2 luar negeri, dan sudah tidak mau lagi mengadakan investasi dinegerinja sendiri. Sebabnja ialah bahwa fase pembangunan mereka berikutnja akan memerlukan perubahan2 sosial jang mendalam, karena rakjat banjak terbelakang dan ketinggalan didalam fase2 sebelumnja.

Djadi jang diperlukan negara2 Latin Amerika ini adalah investasi sosial jang besar. Diperlukan sekolah2, djalan2, perumahan, ke-trampilan dan kesempatan kerdja dsb.nja, jang sampai sekarang tidak diperhatikan.

Maka demikianlah suatu pertumbuhan berdasarkan landasan sosial jang sempitachirnja matjet, dengan akibat tumbuhnja matjam2 ketegangan sosial, perang gerilja, coup dan counter coup.

Peladjaran jang harus kita tarik ialah, bahwa untuk waktu jang terbatas, dan sampai pada suatu tingkat penghasilan nasional tertentu, pertumbuhan ekonomi memang bisa dilaksanakan atas suatu landasan sosial jang sempit, tapi lantas matjet.

Matjet, krena rakjat akan sadar dan tidak mau menerima situasi dimana mereka tidak dilibatkan, tidak diikutsertakan didalam menikmati kemungkinan2 baru jang dihasilkan oleh pembangunan.

Djadi, usaha pembangunan, biarpun seperti di Indonesia, dia harus mulai dari suatu landasan jang sempit jaitu kemampuan ekonomi modern, usaha pembangunan itu setjara sadar harus senantiasa memperluas landasan sosialnja.-

Bukan sadja untuk mendjamin keadilan sosial, tetapi untuk mendjamin kelangsungan daripada momentum, djangan sampai pada suatu ketika dia matjet.

Mentjoba mendjamin kelangsungan momentum sebagai tudjuan social planning, djuga mengambil bentuk lain. Misalnja, dakam hal ini investasi besar disuatu daerah tertentu, seperti Projek Asahan. Bagaimana kita mau memanfaatkan adanja investasi itu?

Bagaimana mendudukan dan memanfaatkan usaha ini dalam pembangunan daerah sebagi keseluruhan. Empljment policy apa jang mau kita kembangkan disana.

Pula, djikalau kita mau mentjegah djangan sampai penanaman modal

asing itu merupakan badan tersendiri yang asing daripada perkembangan daerah, kita harus setjara sadar, setjara planned, mentjoba mengkaitkan perusahaan asing itu dengan kemampuan2 dan keperluan2 kita. Pula kita harus mengadakan planning tentang matjamnja labor force dan komposisi daripada labor force agar supaya tidak timbul matjam2 persoalan, misalnja dibidang keseimbangan antar-suku.

Begitupun dalam mengedjar pengluasan landasan sosial, kita djuga tidak bisa melepaskan diri daripada masalah struktur ekonomi politik.

Kita mewarisi suatu struktur ekonomi kolonial, yang diperkembangkan untuk keperluan penguasa kolonial, untuk keperluan suatu sektor modern yang ketjil yang mengatur dari pusat tjara produksi daripada rakjat Indonesia untuk kepentingan kolonial se-mata2. Masyarakat Indonesia diperhatikan oleh penguasa kolonial, sedjauh usaha2 produksinja itu ada kepentingannya untuk penguasa kolonial.

Kolonialisme sekarang sudah selesai dan kita harus menjadari suatu ekonomi nasional, suatu "modern growth economy". Sekita tahun 50-an, kita mulai mentjoba untuk mengadakan suatu policy kearah itu. Tetapi usaha itu gagal karena matjam2 faktor. Kita semuanja masih ingat gejala importeur dan pengusaha actentas, yang sebenarnja tidak ada kemampuannya tetapi hanja mendjadi kedok untuk kekuatan2 ekonomi lain.

Sekarang didalam mempersiapkan Repelita II, kita berhadapan dengan persoalan ini kembali. Apakah kita akan mengedjar "growth" dalam rangka bekas2 struktur ekonomi kolonial? Atau kita akan memperkembangkan suatu policy yang akan membuat ekonomi Indonesia suatu ekonomi yang setjara integral bisa tumbuh? Dari gambaran ini teranglah, bahwa social planning itu meliputi suatu bidang yang djauh lebih luas daripada yang dahulu dianggap bidang2 sosial dan lebih luas daripada apa yang biasa diketemukan dalam texbook2 dan literatur PBB mengenai hal ini.

Dari uraian ini maka mendjadi teranglah bahwa ada perbedaan antara growth dan development, antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi perlu, namun tidak mentjukupi untuk mentjapai pembangunan karena pembangunan meliputi segala perubahan lain, terutama dibidang sosial politik, yang dapat membuat growth itu

(7) suatu.....

suatu selfsustaining proses, suatu proses yang akan dapat berdjalan terus atas kekuatan sendiri sekali dia dilantjarkan.

Pembangunan pada hakekatnja bukan semata pembinaan suatu sistem ekonomi, melainkan lebih luas lagi, dynamisasi suatu sistem sosial dalam keseluruhannjaperwujudan suatu masyarakat, suatu kebudayaan baru. Dan salah satu alat penting ialah : Social planning.

Maka dari itu social planning lebih pokok dan lebih luas bidangnya daripada pengkotakan yang lazim diketemukan didalam buku-buku pelajaran dan literatur PBB tentang hal ini.

Tidak tjukupnja sistem pengotakan lama dapat dilihat pada masalah tenaga kerdja.

Teranglah bahwa sektor employment didalam planning kita tidak dapat dianggap dan diperlakukan sebagai suatu sektor tertentu disamping sektor lain, melainkan bahwa masalah kesempatan kerdja ini disamping "growth rate" yang hendak ditjapai - harus merupakan sudut penglihatan integral daripada segala permasalahan pembangunan. Demikianlah misalnja segi kesempatan kerdja ini akan harus mempengaruhi diantaranya :

- a). Perumusan politik industrialisasi kita (sampai dimana Pemerintah bersedia memberi prioritas kepada industri yang labor intensive, sampai dimana Pemerintah bersedia memberi prefensi kepada production design yang labor intensive, dan bersedia mengadakan desentralisasi daripada industri kedaerah pedesaan.
- b). Perumusan pembangunan daerah pedesaan (sampai dimana mekanisasi pertanian mempersulit atau mempermudah masalah kesempatan kerdja ini).
- c). Perumusan kebijaksanaan import, credit dan bea tjukai sebagai manifestasi daripada imbalanced yang dikehendaki oleh Pemerintah antara harga mesin dan harga buruh yang dianggap optimal untuk kondisi di Indonesia.

Begitupun research and development policies perlu ditudjukan kepada masalah employment promotion itu. Djikalau dipikir bahwa masalah kesempatan kerdja juga dipengaruhi oleh politik pendidikan kita maka dapat dikatakan bahwa didalam planning untuk REPELITA II hampir semua sektor pembangunan memang harus ditinjau rentjana dari sudut employment ini.

"Employment oriented" growth-policy juga perlu menggarahkan pembangunan daerah pedesaan serta pengusaha ketjil, dan bukan sadja memperhatikan sektor industri modern.

(8) Pengusaha.....

Pengusaha2 ketjil inilah, termasuk pedagang2 tekstil dari berbagai suku Sumatera jang sekarang menguasai pendjualan tekstil di Djawa. Mereka semua ini "businessmen", biarpun masih "pra modern". Tapi bersama dengan orang2 daerah pedesaan jang mempunjai kerajinan ketrampilan atau kepandaian tertentu, mereka inilah jang merupakan suatu potensi pembangunan jang sangat penting. Baik dari sudut "employment policy" maupun dari sudut menggairahkan pembaharuan inovasi, biarpun ketjil2, diatas suatu landasan sosial jang luas. Pembangunan ekonomi Djepang dizaman Meiji berdasarkan usaha mereka. Mereka inilah jang sekarang masih "pra-modern" harus dihantarkan kedalam zaman modern, dengan penjuluan tentang tjara2 produksi dan pemasaran, dengan politik perbankan jang tepat, dan kemampuan management modern.

Pengembangan potensi rakjat ini akan memerlukan "social planning" jang meliputi semua bidang ini termasuk bidang pendidikan sekolah2, termasuk universitas akan harus membantu dalam usaha ini. Pengembangan potensi ini akan merupakan pelengkap pada usaha pengembangan sektor swasta Indonesia modern, karena djumlah perusahaan swasta modern terlampau ketjil untuk digunakan sebagai landasan pengembangan sektor Indonesia dalam usaha pembangunan umum.

Persoalan2 strategis lain didalam social planning untuk REPELITA II.-

1. Penggunaan National Income.-

Dalam REPELITA II, kita akan harus menindjau setjara lebih tjermat, berapa daripada pendapatan nasional jang kita rentjanakan itu harus diperuntukkan untuk konsumsi, dan berapa untuk pembangunan seterusnya. Berapa dari kenaikan national income itu akan lari kepada siapa? Dalam kata lain, apa imbangan jang kita rentjanakan antara sektor2 Pemerintah, swasta dan asing, pribumi dan non pribumi, industri, pertanian dan keuangan. Ekonomi kita bukan suatu "command economy", eksperimen2 sematjam itu dizaman Orla sudah gagal.

Dan planning kita tidak boleh mengulangi kesalahan2 dan metoda2 zaman itu. Tapi, apapun tjara planning kita, kita harus menanjakan pada dirikita, "Who gets what?", mengingat struktur sosial Indonesia sekarang.

2. Struktur Ekonomi.

Setjara bagaimana kita bisa keluar daripada struktur ekonomi

(9) kolonial.....

kolonial jang masih ada bekas2 nja?

- 10). Untuk itu kearah manakah harus kita alihkan kemampuan produksi kita?
- 2). Dan setjara bagaimanakah kita bisa memperkembangkan suatu Indonesian enterpreneurial class jang tjukup kuat. Dan setjara bagaimana kita dapat mengembangkann potensi bukan pertanian didaerah pedesaan?
- 3). Imbangan daerah-pusat.

Adi sudah dibitjarakan setjara bagaimana projek2 penanaman modal dari Pusat didaerah dapat dikaitkan dengan pengembangan potensi2 daerah itu sendiri, baik jang modern maupun jang pra-modern.

Dan betapa perlunja kita adakan planning dibidang pendidikan tenaga kerdja, sehingga "labor force" jang akan ada itu dapat menampung investasi2 setjara lebih efektif daripada sekarang.

Perlu pula anak2 daerah jang paling dinamis jang sekarang suka lari dari daerahnja ke Djakarta, merasa tjukup tertarik untuk kembali kedaerah.

Disinilah kira berhadapan dengan suatu masalah pokok tentang imbangan keuangan daerah-pusat, jang R.U.U.-nja sekarang matjet di DPR.

Padahal kita tidak bisa bitjara mengenai "regional Planning", kalau masalah ini tidak diatur lebih dahulu. Sangat perlulah masalah ini ditindjau dari sudut keperluan keseluruhan pembangunan Indonesia, dan bukan dari segi administratif sadja.

Mendjaga keseimbangan anantara Pusat dan Daerah dalam rangka negara kesatuan, keseimbangan antar daerah, keseimbangan antar kota dan pedesaan, bahkan antara generasi pemerintah, mendjadi tudjuan penting didalam planning sosial.

Begitu djuga planning jang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan nasional, solidaritas nasional dan persatuan serta kesatuan bangsa.

Achirul kata.-

Demikianlah mudah2 an telah mendjadi lebih terang betapa pendingnja "social planning" dalam usaha pembangunan kita, dan betapa perlunja "social planning" tidak dianggap sebagai planning dalam beberapa bidang khusus sadja,

(10) melainkan.....

melainkan harus menghajati semua bidang lain, serta seluruh proses planning daripada pembangunan.

Namun sebelum uraian ini diakhiri, perlulah dikemukakan setjara singkat faktor demografis serta dimensi daripada permasalahan yang terbuka olehnya.

Dalam segala usaha planning social tidak dapat kita tutup mata terhadap projeksi2 demografis yang mengatakan bahwa- djuga djikalau usaha Keluarga Berentjana berhasil baik - djumlah penduduk Indonesia akan berlipat ganda dalam 30-th yang akan datang, jaitu didalam djangka waktu yang kira2 masih akan dialami oleh anak2 kita. Namun sekarangpun kita sudah mengalami kesulitan untuk menjediakan keperluan hidup seperti pekerdjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, perumahan, dsb.

Akan diperlukan tjara2 baru untuk menghadapi persoalan2 yang besar ini, boleh dikatakan dalam segala bidang. Pastilah akan diperlukan kreativitas, keberanian dan kerdja keras, untuk memperkembangkan tjara2 baru yang diperlukan ini.

Maka dapatlah dikatakan bahwa tugas utama daripada "spcial planning" di Indonesia, dalam djangka yang agak lebih djauh, ialah setjara bagaimana memungkinkan 240-djuta bangsa Indonesia untuk hidup aman dan sentosa, sedjahtera dan bahagia.-

eeeeeeeee